



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK FAUZI DAKHLAN
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 406641

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/100 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 1402 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 4450 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/87 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 421.000.000

1. MOTOR, SUZUKI GWS 250 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO ZIP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, SUZUKI GSX250 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 55.000.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. 4.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 612.092.456



F. HARTA LAINNYA	Rp.	800.000.000
Sub Total	Rp.	6.842.092.456
III. HUTANG	Rp.	22.522.818
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.819.569.638

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.